# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memang salah satu syarat utama tercapainya pendidikan yang bermutu adalah profesionalisme guru. Dan sebagai hasilnya, pemerintah melakukan upaya yang disengaja untuk meningkatkan tingkat profesionalisme guru di tanah air.

Sebagai implementasi dari pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga Jurnal Administrasi Publik 87 Profesional yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan : (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal; (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi guru akan memungkinkan atau meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu, sejauh mana profesionalisme guru dapat diwujudkan atau ditingkatkan harus menjadi ukuran seberapa baik aturan sertifikasi guru diterapkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa standar kinerja yang dipenuhi guru sesuai dengan kebijakan sertifikasi ini cenderung hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan belum menjadi penanda budaya kerja profesional. Alhasil, banyak juga yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di bidang pendapatan tambahan, namun masih ada beberapa persoalan dengan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) yang mana dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta*” Ditemukan bahwa kebijakan sertifikasi tidak banyak berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Kebijakan sertifikasi tampaknya dilaksanakan dengan sikap guru yang secara eksklusif mengutamakan kesejahteraan mereka sendiri, kurang memperhatikan efektivitas pengajaran mereka. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad dan Sujianto (2022) dengan judul “*Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru*” menemukan bahwa berbagai faktor, antara lain (1) Mengenai persiapan dan perencanaan, proses penilaian pembelajaran, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Guru, siswa, dan sekolah belum melakukan persiapan yang cukup baik; (2) metode ceramah, diskusi, out class, dan bermain masih digunakan sebagai metode pengajaran utama. Selain itu, adanya guru yang tidak bersertifikat, jam mengajar yang berkurang, dan kecemburuan sosial di masyarakat akibat sertifikasi guru.

Peneliti juga melakukan pra observasi di awal, yang mana ditemukannya laporan dari beberapa stakeholder pada lokasi yang dijadikan lokasi penelitian bahwa disekolah tersebut masih terdapat beberapa guru yang sudah menerima sertifikat pendidik namun dalam segi profesionalitasnya sampai saat ini tidak ada peningkatan yang signifikan, pemenuhan kebijakan sertifikasi dilakukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi semata namun dalam sisi profesionalitasnya masih banyak yang harus dipertanyakan dan dikembangkan.

Berangkat dari beberapa penelitian yang relevan dan temuan di lokasi yang dijadikan tempat penelitian melalui hasil pra-observasi terkait, implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam profesionalitas guru ini, dirasa perlu untuk peneliti lakukan agar dapat menganalisis sejauh mana kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru dan mengetahui apa peranan sertifikasi di dalam meningkatkan profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi, karena masih banyak hal-hal yang perlu ditelitih atau ke depannya perlu diperbaiki jika memang masih terdapat ke tidak sesuaian atau permasalahan . Dengan adanya kebijakan sertifikasi dan guru yang sudah bersertifikasi dan dinyatakan profesional dengan dikeluarkannya sertifikat diharapkan dapat terus mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas pendidikan dan instruksional, termasuk keterampilan kepribadian, keterampilan manajemen, pembelajaran siswa, keterampilan penguasaan materi pelajaran, serta keterampilan sosial dan komunikasi dan berhubungan secara efektif dengan siswa. (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK Depdiknas, 2005).

### 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Apa peran sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis apa saja peranan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru yang telah dirasakan guru hingga saat ini yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perhatian bagi pengambil kebijakan.

### 1.4 Asumsi Penelitian

Berdasarkan observasi awal, peneliti menerima informasi dari stakeholder terkait implementasi kebijakan sertifikasi ini terhadap peningkatan profesionalitas, sebagian guru yang menerima sertifikasi sudah mengalami peningkatan, namun juga masih terdapat guru yang belum terlihat peningkatan dalam hal profesionalitasnya. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi terhadap peningkatan profesionalitas guru di sekolah yang di teliti.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
2. Untuk membuka wawasan dan memberikan gambaran objektif tentang implementasi kebijakan sertifikasi yang ditinjau dari sudut pandang pelaksanaan.
3. Untuk menambah hasil kajian tentang implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya.
4. Secara praktis
5. Sebagai bahan informasi bagi sekolah dan pihak lain yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.
6. Sebagai masukan bagi stakehodler dalam merumuskan dan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan

### 1.6 Batasan Penelitian

Pada penelitian yang diusulkan ini terdapat batasan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Dalam penelitian yang akan terlibat menjadi partisipan yaitu wakil kepala sekolah, guru yang telah memperoleh sertifikasi, tim supervisi sekolah dan siswa.

Namun dalam hal ini, yang menjadi partisipan utama yaitu guru yang memperoleh sertifikasi karena yang merasakan dampak dari penerimaan sertifikasi ini adalah guru tersebut. Sedangkan partisipan lain, informasi yang didapatkan digunakan sebagai data pendukung.

### 1.7 Definisi Istilah

***Sertifikasi guru*** dalam hal ini yaitu tata cara penyerahan sertifikat pendidik kepada guru. Guru yang telah memenuhi persyaratan guru profesional diberikan sertifikasi pendidik. Untuk mengembangkan sistem dan praktik pendidikan yang sangat efektif, seorang guru yang terampil adalah suatu keharusan.

***Kebijakan*** memiliki makna yaitu mengacu pada metode yang digunakan oleh berbagai cabang pemerintahan untuk mengelola kegiatan sehari-hari mereka. Dalam hal ini, kebijakan adalah pola formal yang disetujui oleh pemerintah atau lembaga sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini terkait dengan konsep regulasi organisasi.

***Profesionalitas*** dalam penelitian ini yaitu perilaku orang-orang di lapangan yang benar-benar bertanggung jawab dan yang dengan tulus menghargai profesinya. Selain itu, istilah "profesionalisme" mengacu pada cara di mana individu dari suatu profesi berperilaku terhadap bidang pekerjaan mereka serta tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban mereka.